

KATALOG : 4102004.3502

# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN PONOROGO 2021



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN PONOROGO**



# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN PONOROGO 2021



---

## **INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN PONOROGO 2021**

Katalog BPS : 4102004.3502

No Publikasi : 35020.2027

Ukuran buku : 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman : vi + 81

Naskah :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo

Gambar Kulit :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo

Diterbitkan oleh :

@Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo

Dicetak oleh :

CV. Azka Putra Pratama

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi tulisan ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.**

---

**TIM PENYUSUN**

**Penanggungjawab Umum :**

Ir. Siswi Harini, M.Si.

**Penyunting :**

Muhlison Fatawi, S.ST., M.Si.

**Penulis :**

Muhlison Fatawi, S.ST., M.Si.

Wahyu Tri Mulatsih, S.ST.

Defanny Artha Milasari, S.ST.

**Pengolah Data :**

Wahyu Tri Mulatsih, S.ST.

**Gambar Kulit :**

Wahyu Tri Mulatsih, S.ST.

## KATA PENGANTAR

Pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah selama ini dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah menjalankan program pembangunan yang berkesinambungan, menyeluruh, terarah dan terpadu. Agar program tersebut bisa berjalan sesuai yang direncanakan, maka perlu dievaluasi terhadap sejumlah indikator yang mencerminkan taraf kesejahteraan rakyat.

Publikasi “Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Ponorogo 2021” ini menyajikan indikator-indikator yang dimaksud. Data yang digunakan bersumber dari BPS, Dinas Pendidikan dan Kementrian Agama. Data yang berasal dari BPS, utamanya bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, Survei Angkatan Kerja Nasional, dan hasil Sensus Penduduk.

Hasil pengolahan data dari berbagai sumber tersebut akan disajikan dalam bentuk analisis indikator kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, serta indikator kemiskinan dan indikator sosial lainnya.

Kami berharap semoga dengan kehadiran publikasi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pengguna data, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dalam melakukan evaluasi program pembangunan kesejahteraan rakyat.

Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang turut berpartisipasi dalam penyusunan indikator kesejahteraan rakyat dan semoga kehadiran publikasi ini bermanfaat bagi pengguna data secara luas.

Ponorogo, Desember 2021  
BPS Kabupaten Ponorogo  
Kepala



Siswi Harini

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
1. Kependudukan.....	1
1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis kelamin...	4
1.2 Kepadatan dan Persebaran Penduduk .....	6
1.3 Angka Beban Ketergantungan .....	8
1.4 Penggunaan Alat/Cara KB .....	10
2. Kesehatan .....	13
2.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk .....	16
2.2 Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan .....	19
3. Pendidikan .....	23
3.1 Angka Buta Huruf .....	26
3.2 Rata-rata Lama Sekolah .....	27
3.3 Tingkat Pendidikan .....	28
3.4 Tingkat Partisipasi Sekolah .....	30
3.5 Kualitas Pelayanan Pendidikan .....	32
4. Ketenagakerjaan .....	37
4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) .....	40
4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) .....	42
4.3 Tingkat Pengangguran Menurut Jenjang Pendidikan .....	44
4.4 Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan .....	45
4.5 Upah/ Gaji/ Pendapatan Bersih .....	47

5.	Taraf dan Pola Konsumsi .....	51
	5.1 Pengeluaran Rumah Tangga .....	53
6.	Perumahan dan Lingkungan .....	57
	6.1 Kualitas Rumah Tangga .....	60
	6.2 Fasilitas Rumah Tinggal .....	62
	6.3 Status Kepemilikan Rumah Tinggal .....	62
7.	Kemiskinan .....	65
	7.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Ponorogo .....	68
	7.2 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan .....	69
8.	Sosial Lainnya .....	73
	8.1 Teknologi Informasi dan Komunikasi .....	75
	8.2 Kredit Usaha .....	77
	8.3 Jaminan Sosial dan Pembiayaan/Asuransi .....	79
	8.4 Kepemilikan Aset .....	80



# KEPENDUDUKAN

<https://portal.pokokab.bps.go.id>





# 1. KEPENDUDUKAN

Isu kependudukan yang kian mengemuka belakangan ini berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Penduduk memang dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, namun di sisi lain penduduk juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak terkontrol dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak.

Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan dapat meningkatkan jumlah penduduk miskin. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh dan tidak layak akibat sempitnya lahan untuk pemukiman seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masalah lain yang dapat muncul diantaranya terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan sarana pendidikan yang terbatas.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan harus terus dilaksanakan dalam upaya

memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

### 1.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Pada tahun 2020, dari 38 kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur, Kabupaten Ponorogo menduduki peringkat dua puluh tiga jumlah penduduk terbanyak. Sementara jumlah penduduk terbesar di Jawa Timur adalah Kota Surabaya. Jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020 berdasarkan Proyeksi Penduduk 2010-2035 tercatat sebanyak 871,83 ribu jiwa. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sekitar empat ratus lima puluh jiwa bila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2019 yang mencapai 871,37 ribu jiwa. Sementara bila dibandingkan dengan sembilan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo saat ini mengalami peningkatan sekitar 1,71 persen dari jumlah penduduk pada waktu pelaksanaan Sensus Penduduk tahun 2010 yang sebesar 856,68 ribu jiwa. Dengan kata lain, selama kurun waktu sembilan tahun terakhir jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo telah mengalami penambahan penduduk sebesar 15,15 ribu jiwa.

**Tabel 1.1 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Ponorogo, 2014-2020**

Tahun	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)
2014	865,81	99,85
2015	867,39	99,91
2016	868,81	99,95
2017	869,89	99,93
2018	870,70	99,92
2019	871,37	99,97
2020	871,83	99,95

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2010-2020

Ditinjau dari laju pertumbuhan penduduk tiap tahunnya, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Ponorogo pada tahun 2019 tercatat sebesar 0,05 persen atau terus mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2014, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Ponorogo masih mencapai 0,22 persen dan terus mengalami penurunan ditahun-tahun selanjutnya. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam hal pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Ponorogo telah menunjukkan adanya keberhasilan.

**Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Ponorogo, 2014-2020 (Persen)**



Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2010-2020

Bila dilihat komposisi penduduk menurut jenis kelamin penduduk laki-laki dan perempuan, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020 sebesar 99,95. Ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan secara rata-rata ada sebanyak 100 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Ponorogo hampir seimbang dengan jumlah penduduk perempuannya. Kondisi dari tahun ke tahun sejak 2014 terlihat bahwa rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Ponorogo cenderung meningkat setiap tahunnya sampai tahun 2016. Namun

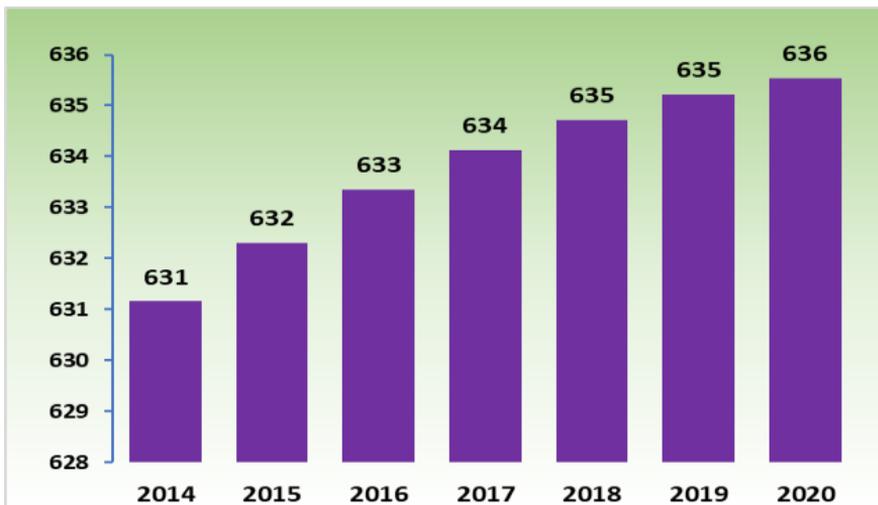
pada tahun 2017 dan 2018 terjadi penurunan rasio jenis kelamin, walaupun pada tahun 2019 kembali mengalami sedikit peningkatan meskipun relatif tidak signifikan, dan tahun 2020 kembali mengalami penurunan. Banyaknya lembaga pendidikan berbasis keagamaan seperti pesantren berkelas nasional maupun internasional yang khusus mendidik santri laki-laki mengakibatkan arus migrasi masuk penduduk laki-laki lebih tinggi dibanding penduduk perempuan. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab rasio jenis kelamin Kabupaten Ponorogo cukup seimbang.

Pada tingkat kecamatan di Kabupaten Ponorogo, wilayah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Ponorogo (78.525 orang) atau 9,01 persen dari total penduduk Kabupaten Ponorogo. Sementara wilayah yang jumlah penduduknya paling sedikit adalah Kecamatan Puduk dengan jumlah penduduk hanya 9.793 orang atau 1,12 persen dari total penduduk Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020.

## 1.2 Kepadatan dan Persebaran Penduduk

Salah satu persoalan yang terkait dengan kependudukan yang masih dihadapi oleh Kabupaten Ponorogo yaitu masalah ketimpangan distribusi

**Gambar 1.2 Kepadatan Penduduk Kabupaten Ponorogo, 2014-2020 (Jiwa/km<sup>2</sup>)**



Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2010-2020

penduduk. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah.

Ada beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, sementara di wilayah lain masih ada yang hanya dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif sedikit. Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi masyarakat setempat. Di satu sisi, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada persoalan meningkatnya jumlah pengangguran karena tidak memadainya penyediaan lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman, serta tidak memadainya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta masalah-masalah sosial lainnya. Di sisi lainnya, wilayah dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit akan memunculkan persoalan optimalisasi sumber daya alam terkait dengan kekurangan tenaga kerja padahal wilayah tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Ponorogo dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk walaupun semakin tahun pertumbuhannya semakin melandai. Pada tahun 2014 kepadatan penduduk Kabupaten Ponorogo sekitar 631 jiwa per km<sup>2</sup>, tahun 2015 meningkat menjadi sekitar 632 jiwa per km<sup>2</sup>, selanjutnya pada tahun 2016 sekitar 633 jiwa per km<sup>2</sup>, serta tahun 2017 sekitar 634 jiwa per km<sup>2</sup>. Sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 kepadatan penduduk Kabupaten Ponorogo sekitar 635 jiwa per km<sup>2</sup>, tahun 2020 penduduk Kabupaten Ponorogo sekitar 636 jiwa per km<sup>2</sup>

Bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk di kabupaten/kota yang berada di eks Karesidenan Madiun pada tahun 2020 seluruhnya berada di bawah 1.000 jiwa per km<sup>2</sup> kecuali Kota Madiun yang mencapai 5.339 jiwa per km<sup>2</sup> sekaligus sebagai wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi. Selanjutnya diikuti Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun dengan masing-masing kepadatan penduduk sekitar 913 jiwa per km<sup>2</sup> dan 676 jiwa per km<sup>2</sup>. Kemudian disusul Kabupaten Ngawi sekitar 641 jiwa

per km<sup>2</sup>, Kabupaten Ponorogo sekitar 636 jiwa per km<sup>2</sup> dan Kabupaten Pacitan sekitar 400 jiwa per km<sup>2</sup>.

**Tabel 1.2 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk di Eks Karesidenan Madiun, 2020**

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )
(1)	(2)	(3)	(4)
Pacitan	555,98	1.389,87	400
Ponorogo	871,83	1.371,78	636
Madiun	683,78	1.010,86	676
Magetan	629,02	688,84	913
Ngawi	830,13	1.295,98	641
Kota Madiun	177,40	33,23	5.339

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2010-2020

Bila dilihat menurut kecamatan, di Kabupaten Ponorogo terjadi ketimpangan distribusi penduduk di wilayah perdesaan dan perkotaan. Pada umumnya kepadatan penduduk yang tinggi berada di perkotaan. Kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Ponorogo sekitar 3.520 jiwa per km<sup>2</sup>, kedua adalah Kecamatan Babadan sekitar 1.542 jiwa per km<sup>2</sup>. Selanjutnya disusul Kecamatan Jetis sekitar 1.283 jiwa per km<sup>2</sup>, Kecamatan Siman sekitar 1.152 jiwa per km<sup>2</sup>, dan Kecamatan Kauman sekitar 1.043 jiwa per km<sup>2</sup>. Sementara kecamatan yang kepadatannya di bawah 500 jiwa per km<sup>2</sup> yaitu Kecamatan Ngrayun, Kecamatan Sawoo, Kecamatan Sooko, Kecamatan Pudak, Kecamatan Pulung, Kecamatan Sampung, dan Kecamatan Ngebel.

### 1.3 Angka Beban Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang

harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Hal ini disebabkan dengan semakin kecilnya angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Selama periode 2014-2020 angka beban ketergantungan cenderung meningkat. Pada tahun 2014 dan 2015 angka beban ketergantungan di Kabupaten Ponorogo sebesar 47,05 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sekitar 47 penduduk usia tidak produktif (di bawah umur 15 tahun dan 65 tahun ke atas). Pada tahun 2016 dan 2017 angka beban tanggungan penduduk berada pada posisi 47,06 persen. Sementara pada tahun 2018 dan 2019 angka beban ketergantungan naik menjadi 47,07 persen (2018) dan 47,08 persen (2019) dan tahun 2020 angka beban tanggungan penduduk berada pada posisi 47,08 persen.

Meningkatnya angka beban ketergantungan diikuti pula dengan meningkatnya proporsi penduduk usia tua (65 tahun ke atas) sebagai dampak dari meningkatnya angka harapan hidup. Tabel 1.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2014 ada sebanyak 10,96 persen penduduk yang berusia tua (65 tahun ke atas). Tahun 2015 dan 2016 proporsi penduduk usia tua meningkat lagi mencapai 10,97 persen. Hingga tahun 2017 proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas terus naik menjadi 10,98 persen. Pada tahun 2018 dan 2019 proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas telah mencapai 10,99 persen, sedangkan tahun 2020 proporsi penduduk usia 65 tahun ke atas sebesar 11,00 persen.

**Tabel 1.3 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan di Kabupaten Ponorogo, 2014-2020 (Persen)**

Tahun	0-14 Tahun	15-64 Tahun	65 Tahun +	Angka Beban Ketergantungan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2014	21,04	68,00	10,96	47,05
2015	21,03	68,00	10,97	47,05
2016	21,03	68,00	10,97	47,06
2017	21,02	68,00	10,98	47,06
2018	21,02	67,99	10,99	47,07
2019	21,01	68,00	10,99	47,08
2020	21,00	68,00	11,00	47,08

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2010-2020

Pada Tabel 1.3 juga dapat dilihat bahwa struktur umur penduduk di Kabupaten Ponorogo masih didominasi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun). Berdasarkan Proyeksi Penduduk 2010-2035 jumlah penduduk usia produktif pada periode 2014-2020 berada pada kisaran 68 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Kabupaten Ponorogo menjadi sangat potensial sebagai modal dasar yang besar untuk pembangunan. Sementara itu, proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) semakin menurun dari 21,04 persen pada tahun 2014 menjadi 21,03 persen pada tahun 2015-2016 dan terus menurun menjadi 21,02 persen pada tahun 2017-2018, sedangkan tahun 2019 persentasenya hanya 21,01 persen, dan pada tahun 2020 turun menjadi 21,00 persen

#### 1.4 Penggunaan Alat/Cara KB

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu. Program KB dilakukan melalui penggunaan alat kontrasepsi/KB yang berbagai jenis/macamnya. Badan Keluarga Berencana selaku instansi pemerintah yang menangani program KB ini mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat.

Terutama untuk kepesertaan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan Implant. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik lagi.

Berdasarkan masa kerjanya, kontrasepsi dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sementara (*reversible*) dan permanen. Pilihan kontrasepsi untuk menunda kehamilan pertama dan mengatur jarak kehamilan adalah kontrasepsi yang memiliki masa kerja bersifat sementara, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keamanan, frekuensi pemakaian dan efek samping, terjangkau harganya, cara penggunaan yang dianggap paling praktis, efisien, minim resiko kegagalan dan resiko efek samping terhadap kesehatan pemakai dan memberikan kenyamanan bagi penggunanya.

**Tabel 1.4 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Jenis Alat/Cara KB di Kabupaten Ponorogo, 2019 dan 2020 (Persen)**

Alat/Cara Kontrasepsi	2019	2020
(1)	(2)	(3)
MOW/Tubektomi/MOP/Vasektomi	7,99	9,16
AKDR/IUD/Spiral	18,61	25,10
Suntikan	38,61	33,86
Susuk KB/Norplant/Implanon/Alwalit	14,73	12,35
Pil	12,22	8,37
Kondom/Karet	4,23	2,39
Intravag/Tisue/Kondom Wanita	0,21	0,00
Cara Tradisional	3,41	8,76
% Wanita Yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi	56,92	52,91

Sumber : Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2019 - 2020

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2019-2020, persentase wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB mencapai di atas 50 persen yaitu masing masing sebesar 56,92 persen pada tahun 2019 dan 52,91 persen pada tahun 2020.

Tabel 1.4 memperlihatkan bahwa dari berbagai macam alat/cara KB yang digunakan, alat kontrasepsi suntikan dan AKDR/IUD/Spiral yang paling banyak diminati di Kabupaten Ponorogo. Pada tahun 2019 penggunaan suntikan mencapai 38,61 persen yang menurun menjadi 33,86 persen pada tahun 2020. Sedangkan penggunaan AKDR/IUD/Spiral yang mengalami kenaikan dari 18,61 persen pada tahun 2019 menjadi 25,10 persen pada tahun 2020.

Menurunnya penggunaan jenis kontrasepsi Suntik disebabkan oleh beralihnya pengguna pada jenis alat kontrasepsi lain seperti AKDR/IUD/Spiral atau MOW/Tubektomi/MOP/Vasektomi. Pada tahun 2019 penggunaan MOW/Tubektomi/MOP/Vasektomi mencapai 7,99 persen, kemudian meningkat menjadi 9,16 persen di tahun 2020.

Cara kontrasepsi tradisional juga masih digunakan oleh pasangan usia subur, meskipun persentasenya kecil yaitu 3,41 persen pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 8,76 persen pada tahun 2020. Penggunaan alat/cara KB secara efektif, selain bermanfaat untuk membatasi jumlah anak yang dilahirkan juga dapat mengatur jarak kelahiran anak.



# KESEHATAN

<https://portal-pengokab.bps.go.id>





## 2. KESEHATAN

Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik, khususnya dalam meningkatkan produktivitas. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang dan meningkatkan Angka Harapan Hidup.

Upaya Pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata serta terjangkau.

Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain Angka Harapan Hidup, Angka Kesakitan, dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti persentase perempuan pernah kawin 15-49 tahun yang persalinannya dilakukan di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga medis, serta persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya.

## 2.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Beberapa indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi tingkat kesehatan masyarakat antara lain Umur Harapan Hidup (UHH) dan angka kesakitan.

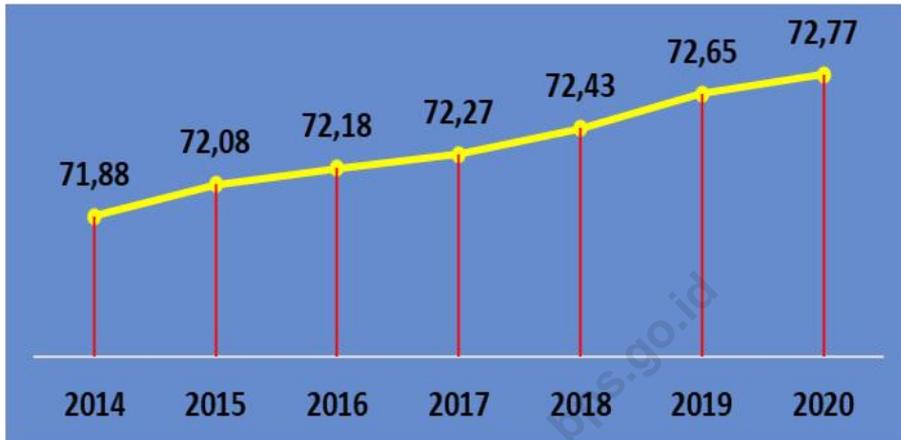
Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan umur harapan hidup penduduk dari suatu wilayah. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

Umur Harapan Hidup (UHH) pada suatu umur  $x$  adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur  $x$  pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Definisi UHH pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. UHH merupakan salah satu alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Umur Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pendidikan dan pemberantasan kemiskinan.

Idealnya Umur Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Death Rate/ASDR*) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian penduduk yang baik secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat Tabel Kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk

menghitung Umur Harapan Hidup digunakan cara tidak langsung dengan menggunakan program *Mortpak Lite*.

**Gambar 2.1 Angka Harapan Hidup Penduduk di Kabupaten Ponorogo, 2014 - 2020 (Tahun)**



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 2014-2020

Dari hasil penghitungan yang dilakukan oleh BPS RI, rata-rata Umur Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Ponorogo selama 7 tahun terakhir (2014 hingga 2020) menunjukkan trend meningkat yaitu dari 71,88 pada tahun 2014 menjadi 72,77 pada tahun 2020.

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional, maka Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2020 menunjukkan Angka Kesakitan penduduk Kabupaten Ponorogo mencapai 18,11 persen, mengalami penurunan sebesar 3,34 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 21,45 persen.

Bila dibedakan menurut jenis kelamin, angka kesakitan penduduk perempuan dan penduduk laki-laki tidak jauh berbeda yaitu 16,70 persen (penduduk laki-laki) dan 19,52 persen (penduduk perempuan).

Jika dibandingkan dengan angka kesakitan Jawa Timur, pada tahun 2020 menunjukkan bahwa angka kesakitan di Kabupaten Ponorogo (18,11 persen) lebih tinggi dari Jawa Timur (15,05 persen). Hal ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dimana angka kesakitan Kabupaten Ponorogo selalu lebih rendah daripada angka kesakitan Jawa Timur.

**Gambar 2.2 Perbandingan Angka Kesakitan di Kabupaten Ponorogo dan Jawa Timur, 2016-2020 (Persen)**



Sumber : Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016-2020

## 2.2 Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

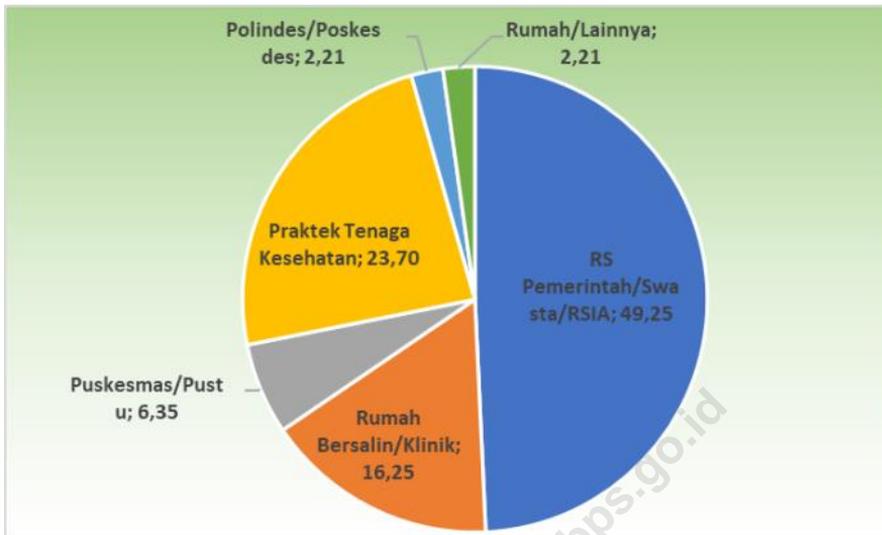
Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) salah satunya adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan

meningkatkan pelayanan neonatal, karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayinya. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan.

Pemilihan tempat persalinan yang tepat, menjadi salah satu bentuk kesadaran masyarakat dalam menjaga keselamatan dan kesehatan ibu dan bayi. Tingkat kesadaran masyarakat pada tahun 2020 di Kabupaten Ponorogo sudah tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan persentase perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan sebelum dua tahun yang lalu di rumah sakit, rumah bersalin/klinik, dan praktek tenaga kesehatan sebesar 95,55 persen. Sebanyak 2,21 persen melahirkan di polindes/poskesdes, sedangkan yang melahirkan di rumah atau tempat lainnya hanya sekitar 2,24 persen.

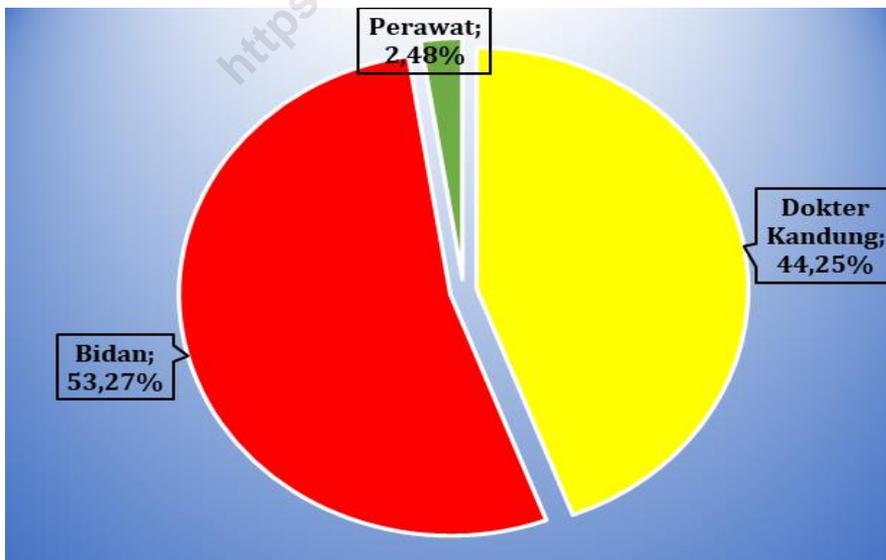
Persentase perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang persalinannya ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu dokter, bidan, atau perawat di Kabupaten Ponorogo mencapai 100,00 persen. Kondisi tersebut disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mempercayakan penanganan persalinannya kepada tenaga kesehatan. Penolong persalinan terbanyak dilakukan oleh bidan sebesar 53,27 persen. Lalu sebesar 44,25 persen dilakukan oleh dokter kandungan dan 2,48 persen oleh perawat.

**Gambar 2.3 Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 15-49 Tahun Menurut Tempat Melahirkan Terakhir Sebelum Dua Tahun yang Lalu di Kabupaten Ponorogo, 2020**



Sumber : Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020

**Gambar 2.4 Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 15 - 49 Tahun Menurut Penolong Kelahiran Terakhir pada Anak Lahir Hidup Terakhir di Kabupaten Ponorogo, 2020**

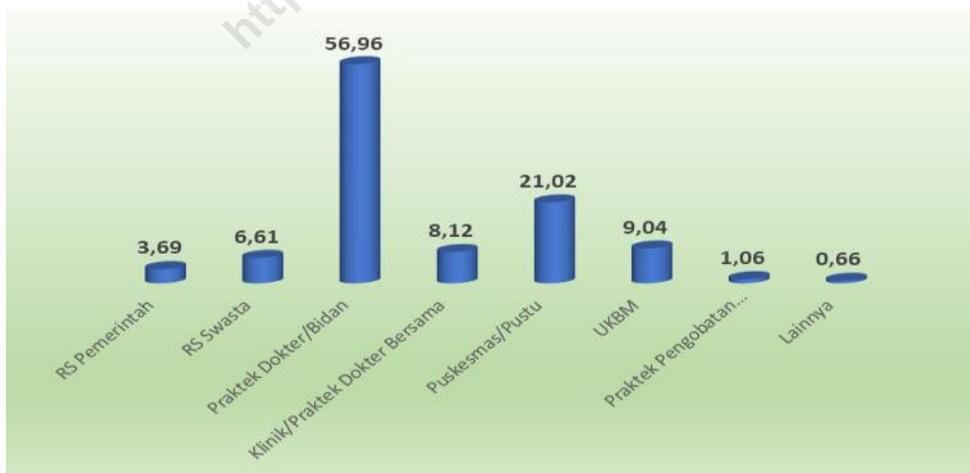


Sumber : Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020

Pada umumnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh masyarakat sangat erat terkait dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kondisi wilayah tempat tinggal mereka berada. Masyarakat yang sebulan terakhir mengalami keluhan kesehatan maupun gangguan sakit ada yang berobat jalan bahkan sampai rawat inap tetapi ada pula yang memilih untuk tidak berobat jalan. Pada tahun 2020, masyarakat yang memiliki keluhan kesehatan maupun gangguan sakit yang memilih untuk berobat jalan sebesar 39,79 persen.

Masyarakat mayoritas memilih untuk ke praktek dokter/bidan untuk berobat jalan dengan persentase 56,96 persen. Pilihan kedua adalah ke puskesmas/pustu sebesar 21,02 persen. Hal ini dapat disebabkan karena pengobatan ke puskesmas yang digratiskan dan dekat dengan tempat tinggal. Rumah sakit belum menjadi pilihan utama karena kecenderungan seseorang berobat ke rumah sakit bila sakit yang dideritanya sudah cukup parah dan memerlukan penanganan khusus dengan fasilitas yang lengkap. Praktek pengobatan tradisional/alternatif dan lainnya menjadi pilihan terakhir untuk masyarakat berobat jalan.

**Gambar 2.5 Persentase Penduduk Menurut Tempat Berobat Jalan yang Dikunjungi Selama Satu Bulan Terakhir di Kabupaten Ponorogo, 2020 (Persen)**



Catatan : UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) meliputi poskesdes, polindes, posyandu dan balai pengobatan  
 Sumber : Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020





**PENDIDIKAN**

<https://portal.pusatbukabps.go.id>





## 3. PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan cikal bakal dari terbentuknya kualitas sumber daya manusia yang handal. Pendidikan yang baik akan melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan kompeten. Oleh karena itu, pendidikan juga merupakan salah satu faktor penting kewibawaan sebuah negara di mata dunia internasional.

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan telah lama dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pembangunan pendidikan di Indonesia sejak tahun 1980-an ditempuh melalui empat kebijakan pokok yaitu memperoleh kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, efisiensi manajemen pendidikan dan peningkatan relevansi pendidikan mulai dari anak usia dini sampai dengan usia lanjut.

Memasuki tahun era tahun 1990-an, pendidikan Indonesia menekankan pada pengembangan sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan masa depan melalui pelaksanaan wajib belajar 9 tahun yang ditunjang dengan program kejar paket. Sebagai tindak lanjut dari keseriusan pemerintah di bidang pendidikan, maka diterbitkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan bahwa anggaran pendidikan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sekurang-kurangnya sebesar 20 persen dari total anggaran belanja.

Pembahasan mengenai indikator bidang pendidikan di Kabupaten Ponorogo menjadi penting untuk melihat sejauh mana capaian di bidang pendidikan sekaligus mengidentifikasi tantangan ke depan sebagai bahan evaluasi pemerintah dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembahasan akan difokuskan pada indikator capaian di bidang pendidikan seperti angka buta huruf, rata-rata lama sekolah, tingkat pendidikan, dan

tingkat partisipasi sekolah. Sedangkan indikator tantangan di bidang pendidikan akan difokuskan pada kualitas pelayanan pendidikan.

### **3.1 Angka Buta Huruf**

Secara harfiah, angka buta huruf merupakan suatu ukuran persentase penduduk usia lima belas (15) tahun ke atas yang tidak bisa membaca dan menulis. Dapat membaca dan menulis yakni diartikan dapat membaca dan menulis surat/kalimat sederhana baik huruf latin atau arab, atau dapat membaca dan menulis huruf Braille. Semakin tinggi angka buta huruf menunjukkan semakin besar pula seharusnya upaya pemerintah dengan berbagai program dan kebijakan untuk memberantas buta huruf. Namun peran masyarakat dalam mendukung dan berpartisipasi untuk memberantas buta huruf sangat diperlukan guna mewujudkan masyarakat yang terbebas dari buta huruf.

Saat ini Kabupaten Ponorogo dikatakan belum terbebas dari buta huruf. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa angka buta huruf di Kabupaten Ponorogo tahun 2020 mencapai 12,22 persen. Lebih lanjut pembahasan secara gender, angka buta huruf penduduk perempuan di Kabupaten Ponorogo jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Angka buta huruf penduduk perempuan tahun 2020 sebesar 16,19 persen, sedangkan angka buta huruf penduduk laki-laki sebesar 8,18 persen.

Jika dibandingkan dengan tahun 2019, angka buta huruf di Kabupaten Ponorogo mengalami kenaikan walaupun cukup signifikan. Secara keseluruhan, dari tahun 2019 ke tahun 2020 angka buta huruf meningkat sebesar 2,44 persen. Angka buta huruf penduduk perempuan meningkat 2,76 persen, sedangkan angka buta huruf laki-laki yang meningkat sebesar 2,12 persen.

Angka buta huruf penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya fasilitas pendidikan, keluarga, ekonomi, budaya dan lainnya.

**Gambar 3.1. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Angka Buta Huruf di Kabupaten Ponorogo, 2020 (Persen)**



*Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2019-2020*

### **3.2 Rata-Rata Lama Sekolah**

Rata-rata lama sekolah menjadi salah satu indikator tingkat pendidikan suatu masyarakat. Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 25 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani seseorang mulai dari masuk pada jenjang sekolah dasar sampai dengan jenjang pendidikan terakhir. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah tahun standar yang harus dihabiskan seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan. Angka rata-rata lama sekolah dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Angka ini merupakan indikator yang diformulasikan oleh UNDP pada tahun 1990 untuk penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka rata-rata lama sekolah dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan program wajib belajar nasional.

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Ponorogo tahun 2020 mencapai 7,54 tahun, artinya bahwa secara rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas mengenyam bangku pendidikan sekolah selama 7,54 tahun atau setara dengan kelas VII tingkat SMP. Tentunya capaian ini masih dibawah target pemerintah dengan program wajib belajar 9 tahunnya, bahkan capaian ini masih di bawah capaian Jawa Timur yang mencapai 7,88 tahun. Namun demikian, jika dibandingkan dengan tahun 2019, rata-rata lama sekolah Kabupaten Ponorogo mengalami peningkatan dari 7,21 tahun pada 2019 menjadi 7,54 tahun pada 2020.

**Gambar 3.2. Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Ponorogo, 2014-2020 (Tahun)**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2014 - 2020

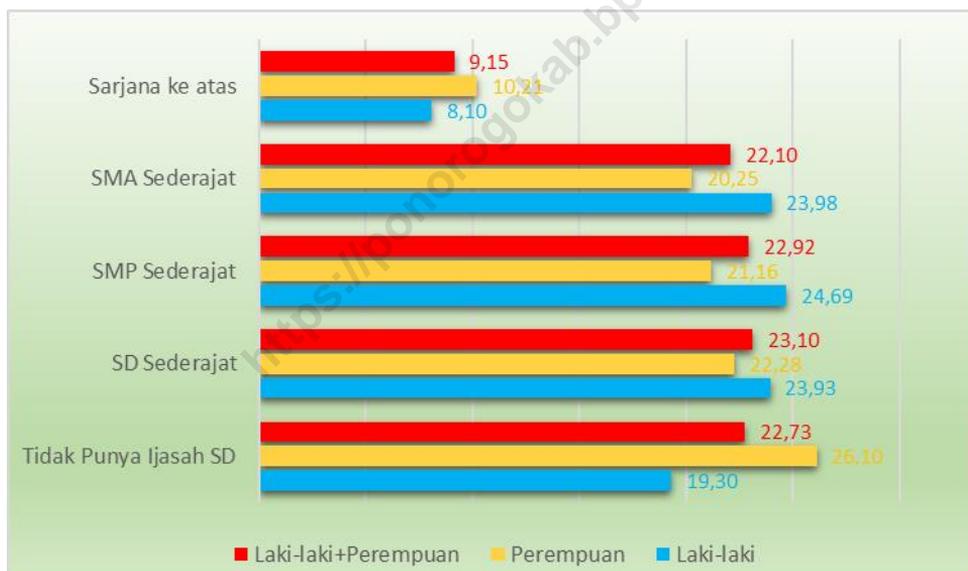
### 3.3 Tingkat Pendidikan

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan menjadi salah satu indikator untuk melihat kualitas sumber daya manusia. Intelektual seseorang pada umumnya akan semakin meningkat seiring dengan bertambah tingginya tingkat pendidikan seseorang. Demikian juga kemampuan interaksi sosial seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan akan memperbesar

kesempatan seseorang di pasar kerja nantinya. Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, ditandai dengan sertifikat/ijazah.

Secara umum, tingkat pendidikan di Kabupaten Ponorogo tidak begitu tinggi. Persentase penduduk Kabupaten Ponorogo usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai ijazah SD sebanyak 22,73 persen, tamat sekolah dasar (SD) atau sederajatnya sebesar 23,10 persen dan tamat sekolah menengah pertama (SMP) sebesar 22,92 persen. Dengan demikian, sebanyak 68,75 persen penduduk Kabupaten Ponorogo usia 15 tahun ke atas hanya berpendidikan SMP ke bawah.

**Gambar 3.3. Persentase Penduduk Kabupaten Ponorogo Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Ponorogo, 2020**



Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020

Program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah dirasakan sudah optimal. Hal ini terlihat dari persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) ke atas mencapai 31,25 persen yang terdiri dari tamat SMA atau sederajat sebesar 22,10 persen, sedangkan tamat sarjana ke atas (D1/D2/D3/D4/S1/S2/S3) sebesar 9,15 persen.

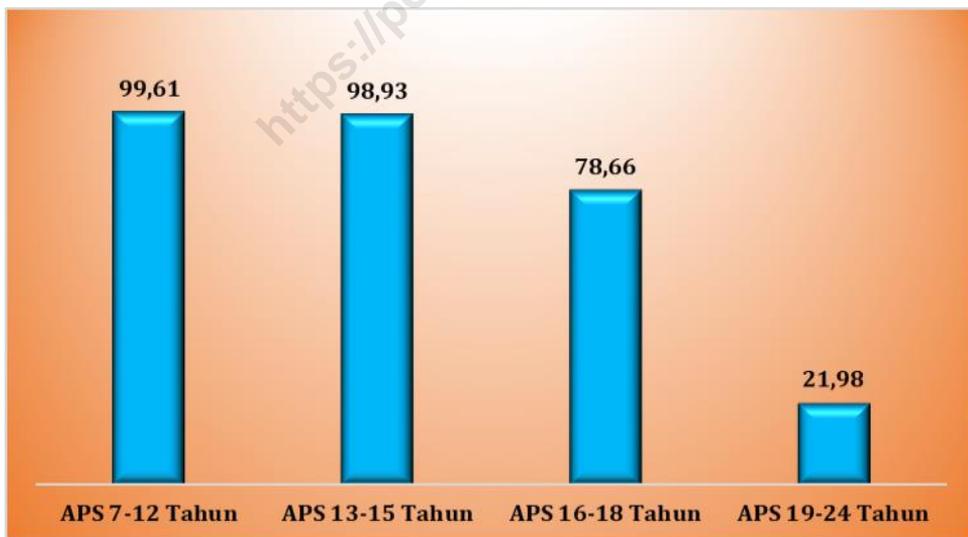
Yang menarik secara gender adalah persentase penduduk perempuan yang tidak tamat SD (26,10 persen) ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki (19,30 persen).

### 3.4 Tingkat Partisipasi Sekolah

Untuk mengetahui capaian di bidang pendidikan, salah satunya dengan melihat tingkat partisipasi sekolah penduduknya. Indikator yang digunakan untuk mengkaji tingkat partisipasi sekolah diantaranya adalah angka partisipasi sekolah (APS) dan angka partisipasi murni (APM).

Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS digunakan sebagai indikator dasar untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam bangku pendidikan.

**Gambar 3.4 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekolah di Kabupaten Ponorogo, 2020 (Persen)**



Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020

Secara umum, APS Kabupaten Ponorogo per masing-masing kelompok usia sekolah ditunjukkan pada gambar 3.4. APS kelompok usia 7-12 tahun

Kabupaten Ponorogo tahun 2020 sebesar 99,61 yang berarti bahwa 99,61 persen penduduk Kabupaten Ponorogo usia 7-12 tahun mengenyam pendidikan di sekolah (tanpa memandang tingkatan sekolahnya).

APS kelompok usia 13-15 tahun Kabupaten Ponorogo tahun 2020 sebesar 98,93. Interpretasinya sama dengan sebelumnya, bahwa penduduk Kabupaten Ponorogo pada usia 13-15 tahun 98,93 persen memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan di sekolah. Sementara itu, APS kelompok usia 16-18 tahun Kabupaten Ponorogo tahun 2020 sebesar 78,66 persen. Angka ini jauh lebih kecil lagi dibandingkan APS kelompok usia 13-15 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ada sekitar 21 persen penduduk Kabupaten Ponorogo usia 16-18 tahun tidak memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan di sekolah. Lebih lanjut, APS kelompok usia 19-24 tahun sebesar 21,98 persen dimana hal ini menunjukkan bahwa semakin besar usia seseorang, semakin kecil akses terhadap fasilitas pendidikan di sekolah.

### **3.5 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)**

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan system pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

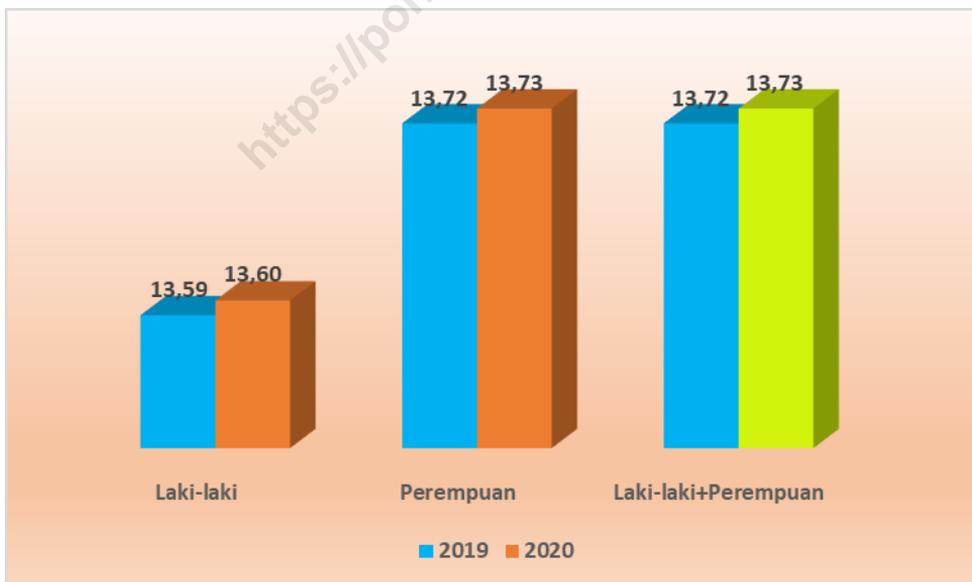
Indikator HLS dan RLS digunakan sebagai variable pendidikan sejak tahun 2010. *United Nation for Development Programs* (UNDP) sudah tidak lagi menggunakan indikator Angka Buta Huruf dan Melek Huruf untuk penghi-

tungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena sudah tidak sensitif lagi dalam menangkap pergerakan persentase penduduk melek huruf antar daerah akibat nilainya yang sudah tinggi (hampir 100 persen).

Angka HLS Ponorogo tahun 2020 sebesar 13,73 tahun sedikit meningkat dibanding tahun 2019 (13,72 tahun). Angka tersebut menunjukkan bahwa anak usia 7 tahun ke atas, dengan adanya sistem pendidikan yang dibangun pemerintah, mempunyai harapan dapat menempuh pendidikan formal hingga umur 13 tahun.

Ditinjau dari aspek gender, HLS laki-laki sedikit lebih rendah dibandingkan penduduk perempuan. HLS laki-laki tercatat sebesar 13,59 tahun, sedangkan penduduk perempuan 13,72 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk perempuan yang memanfaatkan sistem pendidikan yang dibangun pemerintah.

**Gambar 3.5 Angka Harapan Lama Sekolah menurut Gender di Kabupaten Ponorogo, Tahun 2019 dan 2020 (Tahun)**



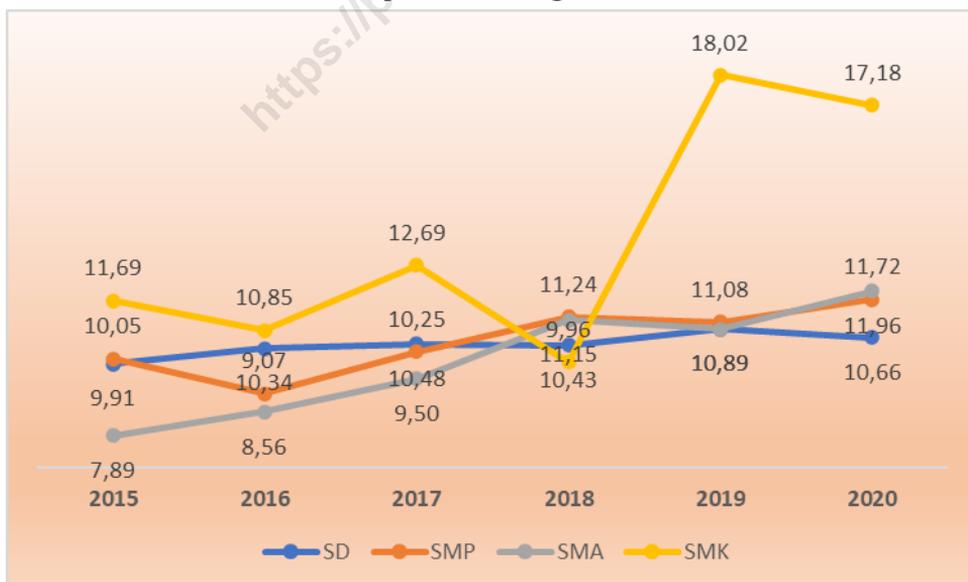
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2019 dan 2020

### 3.6 Kualitas Pelayanan Pendidikan

Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan salah satunya ditentukan oleh kualitas pelayanan pendidikan. Kualitas pelayanan pendidikan telah menjadi perhatian utama pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia penerus generasi bangsa. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjamin kualitas pendidikan di Indonesia.

Pengukuran kualitas pelayanan pendidikan dapat dilihat dari rasio murid-guru, rasio guru-sekolah dan rasio murid-kelas. Rasio tersebut untuk melihat seberapa memadai fasilitas sekolah (sekolah/kelas/guru) yang disediakan untuk memenuhi permintaan jasa pendidikan. Dalam hal ini pemerintah sebagai penyelenggara negara sangat berperan penting dalam menyediakan fasilitas pendidikan di atas.

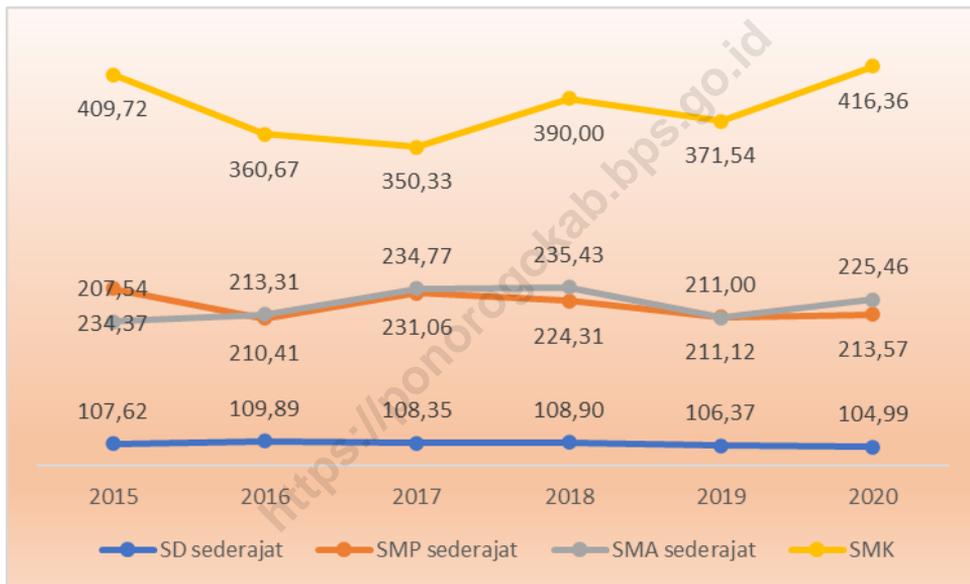
**Gambar 3.6 Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Ponorogo, 2015-2020**



Sumber: Dinas Pendidikan & Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo 2015-2020, diolah

Rasio murid-guru pada jenjang pendidikan SMP sederajat dan SMA sederajat di Kabupaten Ponorogo tahun 2020 mengalami peningkatan yang ditunjukkan angka rasio yang lebih besar pada tahun tersebut. Hal ini dapat diartikan pada tahun 2020 di Kabupaten Ponorogo setiap satu guru tingkat SMP sederajat dan SMA sederajat mempunyai beban mengajar murid yang lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Rasio murid-guru pada jenjang SD sederajat dan SMK justru mengalami penurunan.

**Gambar 3.7. Rasio Murid-Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Ponorogo, 2015-2020**



Sumber: Dinas Pendidikan & Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo 2015-2020, diolah

Rasio murid-guru diartikan sebagai banyaknya murid yang dibimbing oleh satu guru. Semakin kecil rasio murid-guru maka semakin sedikit murid yang dibimbing oleh guru, dengan demikian diharapkan transfer ilmu dari guru pada anak didiknya semakin baik dan kualitas pelayanan pendidikan semakin bagus. Dengan kata lain, pada tahun 2020 secara garis besar terjadi penurunan fasilitas sekolah yang memadai dengan rasio murid/guru yang meningkat kecuali untuk jenjang SMK.

Selain rasio murid-guru, indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis kualitas pelayanan adalah rasio murid-sekolah. Rasio murid-sekolah menggambarkan kemampuan sekolah dalam menampung peserta didik. Rasio murid-sekolah menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Ponorogo cenderung menurun pada jenjang SD sederajat dan SMK. Pada tahun 2020 rasio murid-sekolah tertinggi adalah pada jenjang SMK sebesar 416,36, dimana dapat diartikan satu sekolah menampung 416 murid.

Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan tidak hanya didorong oleh penambahan jumlah guru dan unit sekolah (faktor input) saja, namun yang perlu menjadi perhatian adalah keseluruhan sistem pendidikan. Sebuah sistem mengandung rangkaian kegiatan mulai dari input, proses, output serta faktor internal dan eksternal, dimana masing-masing komponen/kegiatan tersebut mempunyai fungsi tertentu untuk mencapai tujuan utama sistem tersebut.





4

# KETENAGAKERJAAN

<https://portal.pptgokab.bps.go.id>





## 4. KETENAGAKERJAAN

Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat menjadi sasaran pembangunan ideal suatu daerah.

Disinilah letak isu pentingnya faktor ketenagakerjaan itu berperan dalam sebuah aktifitas bisnis dan perekonomian unggulan Kabupaten Ponorogo. Ketenagakerjaan masih menjadi permasalahan yang harus dihadapi oleh pemerintah untuk menerapkan strategi dan langkah tepat untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah.

Tenaga kerja merupakan modal bagi geraknya roda pembangunan. Kondisi jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Karena itu pentingnya data mengenai perkembangan ketenagakerjaan sangatlah penting bagi pemerintah terkait dalam pengambil kebijakan yang tepat sasaran.

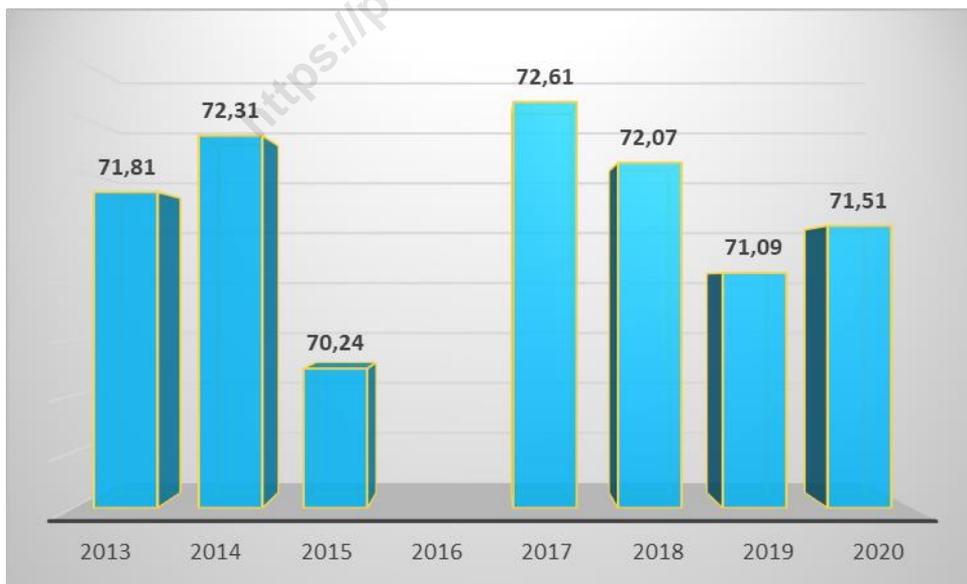
Bab ini akan memberikan gambaran mengenai beberapa indikator tenaga kerja yang bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) kondisi Agustus tahun 2013-2018. Namun indikator tenaga kerja tahun 2016 tidak dapat diulas karena sampel Sakernas di tahun tersebut tidak mencukupi untuk estimasi sampai dengan tingkat kabupaten/kota. Indikator yang akan dianalisis antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, persentase penduduk bekerja menurut lapangan usaha dan jumlah jam kerja, serta persentase pekerja menurut kelompok upah, gaji/pendapatan bersih.

#### 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja/usia produktif 15 tahun ke atas. Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja dikenal pula indikator untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

**Gambar 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Ponorogo, Agustus 2013 - 2020**



Sumber : Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur, Agustus 2013-2020  
Keterangan : Data tahun 2016 tidak tersedia

**Tabel 4.1 Penduduk Kabupaten Ponorogo Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama, Agustus Tahun 2017 - 2020**

Jenis Kegiatan Utama	Satuan	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Angkatan Kerja (AK)	orang	506.848	505.250	500.457	513.781
Bekerja	orang	487.811	485.697	482.535	490.912
Pengangguran	orang	19.037	19.553	17.922	22.869
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	72,61	72,07	71,09	71,51
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,76	3,87	3,58	4,45

Sumber : Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur, Agustus 2017-2020

Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja.

**Gambar 4.2 Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Ponorogo, 2012-2020 (Ribuan Orang)**



Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur, Agustus 2012-2020

Keterangan : Data tahun 2016 tidak tersedia

Angka TPAK dan TPT bisa mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah serta besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Idealnya capaian hasil pembangunan suatu wilayah dikatakan tinggi apabila angka TPAK tinggi dan TPT yang rendah.

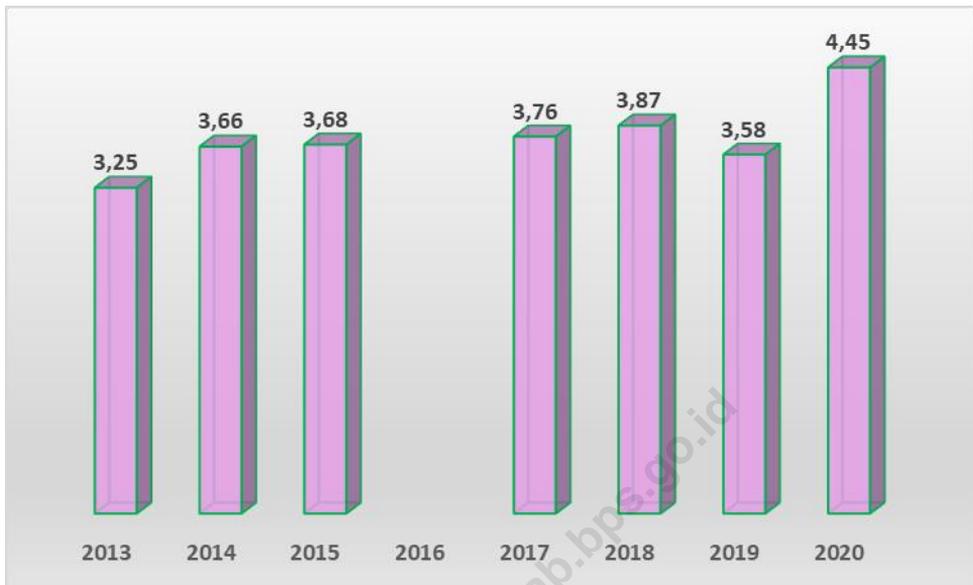
Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Ponorogo pada Agustus 2020 sebesar 513,781 ribu orang, lebih rendah sekitar 13,32 ribu orang dibanding Agustus 2019. Jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu 6 tahun terakhir ini menunjukkan perubahan cukup fluktuatif dengan kecenderungan naik, dampaknya adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Ponorogo yang fluktuatif juga pada kurun waktu tersebut.

Naiknya jumlah angkatan kerja berdampak pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Ponorogo. Pada Agustus 2013, TPAK Kabupaten Ponorogo mencapai 71,81 persen. Pada Agustus 2014, meningkat mencapai angka 72,31 persen. Sedangkan Agustus 2015 sebesar 70,24 persen dan pada Agustus 2017 naik menjadi 72,61 persen. Namun pada Agustus 2018 sedikit menurun menjadi 72,07 persen dan Agustus 2019 turun lagi menjadi 71,09 persen, kemudian pada Agustus 2020 naik lagi menjadi 71,51 persen. Secara umum, angka ini menunjukkan bahwa 71,51 persen penduduk Kabupaten Ponorogo yang berusia 15 tahun ke atas memutuskan untuk ikut aktif di pasar kerja. Sedangkan 28,49 persen sisanya memutuskan untuk fokus sekolah, mengurus rumah tangga, maupun memiliki kegiatan di luar kegiatan ekonomi seperti kaum lanjut usia (lansia).

#### **4.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Banyak hal yang bisa diindikasikan sebagai pemicu tingkat pengangguran di Kabupaten Ponorogo antara lain dapat disebabkan karena masih adanya kesenjangan antara *supply* tenaga kerja yang tersedia dengan *demand* atau kebutuhan perusahaan/usaha, minimnya informasi tentang kebutuhan tenaga kerja yang tersedia maupun kebutuhan dunia usaha dari sisi kualitas tenaga kerja termasuk di dalamnya.

**Gambar 4.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Ponorogo, 2013-2020**



*Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur, Agustus 2013-2020*  
*Keterangan : Data tahun 2016 tidak tersedia*

Peningkatan pemahaman masyarakat akan perlunya pendidikan juga mempengaruhi mereka yang sudah memasuki usia kerja untuk memilih melanjutkan pendidikan dan menunda peran aktifnya di pasar kerja. Apalagi fenomena tersebut dibarengi dengan semakin didorongnya program wajib belajar dan biaya pendidikan gratis yang ikut menjadi faktor penunda bagi mereka yang sudah memasuki usia kerja untuk terjun ke pasar kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami peningkatan pada penduduk perempuan namun menurun pada penduduk laki-laki. TPT penduduk perempuan pada tahun 2020 meningkat sebesar 1,01 persen dibanding tahun 2019 dari 3,00 persen menjadi 4,01 persen. Demikian juga pada penduduk laki-laki TPT meningkat 0,77 persen dari 4,00 persen di tahun 2019 menjadi 4,77 persen di tahun 2020. Secara keseluruhan TPT Kabupaten Ponorogo meningkat sebesar 0,87 persen dari 3,58 persen di tahun 2019 menjadi 4,45 persen di tahun 2020.

Meningkatnya TPT berarti jumlah penduduk yang menganggur semakin bertambah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun peningkatan TPT penduduk perempuan yang cukup signifikan, namun persentasenya masih jauh lebih rendah dibandingkan TPT pada penduduk laki-laki. TPT Kabupaten Ponorogo tahun 2020 juga masih lebih rendah bila dibandingkan dengan TPT Jawa Timur yang mencapai 5,84 persen.

### 4.3. Tingkat Pengangguran Menurut Jenjang Pendidikan

Mendapatkan pekerjaan yang layak tentunya diharapkan oleh setiap orang. Salah satu usaha untuk mendapatkan kesempatan itu adalah dengan meningkatkan status pendidikan tinggi yang ditamatkan. Dengan semakin ketatnya tingkat persaingan di lapangan usaha serta keterbatasan ketersediaan lapangan usaha, sebagian orang berusaha dengan meningkatkan kualitas keterampilan yang dimiliki. Namun seiring dengan kondisi tersebut muncul permasalahan yaitu lulusan pendidikan tinggi masih banyak yang tidak terserap pada lapangan usaha tersebut, salah satunya disebabkan

**Tabel 4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Ponorogo, 2019-2020**

Pendidikan Tinggi Yang Ditamatkan	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak/ belum pernah sekolah	0,00	0,00	5,52	0,00	3,72	0,00
Tidak/belum tamat SD	1,48	3,08	0,00	1,03	0,71	2,00
SD	1,02	3,39	2,43	1,14	1,61	2,37
SMP	3,81	4,43	1,67	6,51	3,05	5,12
SMA Umum	5,09	2,21	7,42	4,72	5,94	3,18
SMK	12,79	12,18	4,89	10,67	10,29	11,65
D I/II/III/IV	0,00	0,00	0,00	22,44	0,00	8,67
Universitas	5,68	9,23	5,09	6,05	5,39	7,57
<b>Total</b>	<b>4,00</b>	<b>4,77</b>	<b>3,00</b>	<b>4,01</b>	<b>3,58</b>	<b>4,45</b>
<b>SMA +</b>	<b>7,63</b>	<b>6,85</b>	<b>5,52</b>	<b>7,21</b>	<b>6,81</b>	<b>7,00</b>

Sumber : Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur, Agustus 2019-2020, Diolah.

karena sebagian besar lulusan perguruan tinggi cenderung enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang ditamatkan. Akibatnya sebagian dari mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan menjadi penganggur.

Bila dilihat berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan, hampir semua jenjang pendidikan TPT penduduk mengalami kenaikan pada tahun 2020, kecuali penduduk dengan pendidikan tamat SMA mengalami penurunan sebesar 0,34 dari tahun sebelumnya. Secara keseluruhan TPT untuk jenjang pendidikan yang ditamatkan SMA ke atas mengalami peningkatan di tahun 2020. Perlu dikaji lebih lanjut agar diperoleh solusi permasalahan TPT di Kabupaten Ponorogo yang didorong oleh tingginya angka TPT penduduk dengan jenjang pendidikan tamatan SMA ke atas.

TPT penduduk yang berpendidikan SD pada tahun 2020 sebesar 0,64 persen, mengalami kenaikan 0,21 persen dari tahun sebelumnya. TPT penduduk yang berpendidikan SMP baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan sebesar 1,10 persen. TPT untuk penduduk dengan pendidikan yang ditamatkan Universitas mengalami kenaikan dari 0,25 persen pada tahun 2019 menjadi 0,64 persen di tahun 2020. Pada penduduk laki-laki, TPT lulusan Universitas mengalami kenaikan 0,26 persen dari 0,36 persen di tahun 2019 menjadi 0,65 persen di tahun 2020. TPT penduduk perempuan yang berpendidikan universitas juga mengalami peningkatan dari 0,44 persen di tahun 2019 menjadi 0,64 persen di tahun 2020.

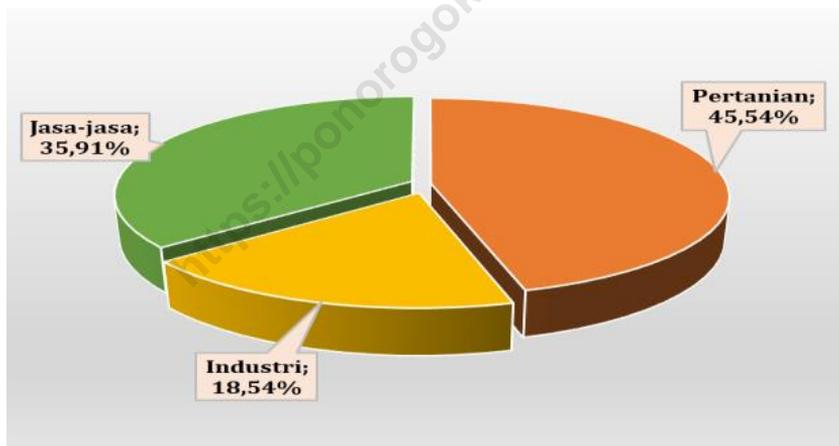
#### **4.4. Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan**

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada publikasi ini dibagi menjadi 3 sektor lapangan usaha yaitu Pertanian (pertanian, kehutanan dan perikanan), Industri (pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, listrik, gas dan air serta konstruksi) dan Jasa-jasa (perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel, angkutan,

perdagangan, komunikasi, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan, serta jasa kemasyarakatan).

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2020, secara umum persentase penduduk yang bekerja pada sektor Industri mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya dari 20,98 persen menjadi 18,54 persen. Peningkatan terjadi di sektor Jasa-jasa sebesar 35,52 persen di tahun 2019 menjadi 35,91 persen di tahun 2020. Demikian juga pada sektor Pertanian. Penduduk yang bekerja di sektor ini secara umum meningkat 2,04 persen dibandingkan dengan tahun 2019, naik dari 43,50 persen di tahun 2019 menjadi 45,54 persen di tahun 2020.

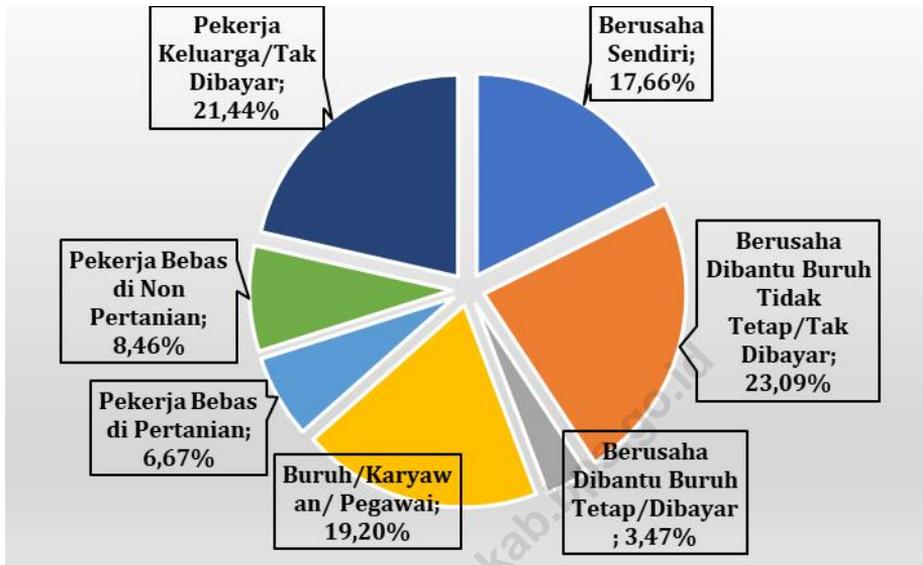
**Gambar 4.4 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Kelompok Lapangan Usaha di Kabupaten Ponorogo, Agustus 2020**



Sumber : Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur, Agustus 2020

Secara keseluruhan, sektor pertanian tetap menjadi lapangan usaha terbesar yang menyerap penduduk bekerja di tahun 2020. Komposisi ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya, sektor Pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Meski terlihat kecenderungan terjadinya pergeseran komposisi tenaga kerja dan lapangan pekerjaan dari sektor Pertanian ke sektor Industri dan Jasa-jasa.

**Gambar 4.5 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu Menurut Kelompok Status Usaha di Kabupaten Ponorogo, Agustus 2020**



Sumber : Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur, Agustus 2020

Pada tahun 2020 jumlah penduduk yang bekerja sebagai berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar masih lebih besar dibandingkan status pekerjaan yang lain yaitu mencapai 23,09 persen. Persentase terbesar selanjutnya adalah penduduk yang bekerja sebagai pekerja keluarga/tak dibayar-bekerja yaitu sebesar 21,44 persen. Penduduk yang bekerja sebagai dengan status buruh/karyawan/pegawai adalah yang terbesar berikutnya dengan persentase mencapai 19,20 persen. Sebaliknya penduduk yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap/dibayar menempati komposisi terkecil dengan persentase hanya 3,47 persen.

#### 4.5. Upah/ Gaji/ Pendapatan Bersih

Balas jasa yang diberikan pada pekerja sebagai imbalan atas jasa yang diberikan selama proses memproduksi barang atau jasa pada suatu perusahaan disebut dengan upah/gaji. Melalui ukuran upah/gaji yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik itu sandang, pangan,

papan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya bisa dijadikan tolok ukur kehidupan dikatakan layak atau tidak.

**Gambar 4.6 Rata-rata Upah/Gaji Bersih Buruh/Karyawan Selama Sebulan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Ponorogo, 2015 - 2020 (Juta Rupiah)**



Sumber : Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur, Agustus 2017-2020

Dilihat dari rata-rata upah/gaji bersih penduduk yang bekerja sebulan secara umum terjadi sedikit penurunan yaitu 15,11 persen pada tahun 2020 dengan besaran gaji bersih dari 2,20 juta rupiah sebulan pada tahun 2019 menjadi 2,33 juta rupiah sebulan pada tahun 2020. Meningkatnya persentase penduduk yang bekerja di sektor jasa turut andil dalam kenaikan rata-rata upah/gaji bersih penduduk tahun 2020. Biasanya rata-rata upah/gaji pekerja di sektor pertanian relatif lebih rendah dibandingkan sektor lainnya, sehingga peningkatan pekerja di sektor Industri dan jasa akan membawa pengaruh terhadap kenaikan rata-rata upah/gaji bersih penduduk secara keseluruhan.

Bila dilihat dari rata-rata upah/gaji bersih selama sebulan berdasarkan jenis kelamin terjadi kenaikan untuk upah/gaji pekerja laki-laki dan perempuan pada tahun 2020.

Untuk pekerja laki-laki rata-rata upah meningkat sebesar 8,68 persen dari 2,40 juta rupiah per bulan menjadi sebesar 2,61 juta rupiah per bulan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Sebaliknya, rata-rata upah/gaji untuk pekerja perempuan juga mengalami penurunan sebesar 0,93 persen yaitu dari 1,91 juta rupiah di tahun 2019 menjadi 1,89 juta rupiah per bulan di tahun 2020.

<https://ponorogokab.bps.go.id>





**TARAF DAN  
POLA KONSUMSI**





## 5. TARAF DAN POLA KONSUMSI

Pola konsumsi masyarakat menunjukkan suatu hasrat masyarakat untuk mengkonsumsi barang maupun jasa. Hasrat untuk mengkonsumsi dipengaruhi oleh seberapa besar pendapatan mereka yang dialokasikan untuk konsumsi. Bisa diartikan bahwa konsumsi seseorang berbanding lurus dengan pendapatannya, semakin besar pendapatan semakin besar pula pengeluaran konsumsi. Sehingga bisa dikatakan bahwa pola konsumsi menjadi indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga.

### 5.1. Pengeluaran Rumah Tangga

Pola konsumsi dapat dikenali berdasarkan alokasi penggunaannya. Secara garis besar alokasi pengeluaran konsumsi masyarakat digolongkan ke dalam dua kelompok penggunaan, yaitu pengeluaran untuk makanan dan pengeluaran untuk bukan makanan.

**Gambar 5.1 Persentase Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Ponorogo, 2017-2020 (Persen)**



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 2017-2020

Struktur konsumsi masyarakat Kabupaten Ponorogo mulai mengalami perkembangan, sebagian besar pengeluaran konsumsinya tidak lagi untuk konsumsi makanan tetapi untuk konsumsi bukan makanan. Pergeseran pola konsumsi ini dipengaruhi oleh perubahan pendapatan seseorang. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung.

**Tabel 5.1 Rata-rata pengeluaran per Kapita Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Ponorogo, 2019 - 2020 (Rupiah)**

Jenis Pengeluaran	Pengeluaran per Kapita Sebulan			
	Nominal (Rp)		Persentase	
	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan	415.478	458.674	49,00	45,04
Bukan Makanan	432.363	559.609	51,00	54,96
- Perumahan	192.354	207.583	22,69	20,39
- Barang dan Jasa	112.649	143.183	13,29	14,06
- Pakaian	21.366	27.683	2,52	2,72
- Barang Tahan lama	56.984	123.263	6,72	12,10
- Lainnya	49.007	57.897	5,78	5,69
<b>Jumlah</b>	<b>847.841</b>	<b>1.018.283</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 2019-2020

Gambaran konsumsi masyarakat di Kabupaten Ponorogo dapat dilihat pada tabel 5.1, selama 2019-2020 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk naik dari 847.841 rupiah menjadi 1.018.283 rupiah. Dimana pada tahun 2020 sekitar 458.674 rupiah atau 45,04 persen dikeluarkan untuk

konsumsi makanan, sedangkan 559.609 rupiah atau 54,96 persen dikeluarkan untuk konsumsi bukan makanan. Pada Tahun 2019 sekitar 415.478 rupiah atau 49,00 persen dikeluarkan untuk konsumsi makanan dan 432.363 rupiah atau 51,00 persen untuk konsumsi bukan makanan.

Dilihat dari persentase tersebut pengeluaran untuk makanan mengalami penurunan sedangkan untuk pengeluaran bukan makanan mengalami kenaikan. Peningkatan persentase pengeluaran pada kelompok bukan makanan terjadi pada semua jenis pengeluaran, kecuali pengeluaran untuk perumahan yang turun dari 22,69 persen pada tahun 2019 menjadi 20,39 persen pada tahun 2020. Konsumsi lainnya tersebut antara lain adalah pengeluaran untuk pajak dan asuransi serta keperluan pesta dan upacara.





**PERUMAHAN  
DAN  
LINGKUNGAN**





## 6. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Salah satu kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia adalah adanya rumah tinggal. Selain merupakan kebutuhan yang mendasar, rumah tinggal juga merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah sebagai tempat tinggal juga mempunyai pengaruh terhadap produktivitas kerja seseorang karena selain sebagai tempat tinggal atau hunian juga berfungsi sebagai tempat pusat pendidikan, pembinaan keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Keadaan perumahan yang baik dapat menunjang usaha pembangunan ekonomi, karena dengan kualitas kehidupan yang layak melalui pemenuhan kebutuhan tempat tinggal maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Status sosial seseorang juga dapat ditunjukkan melalui kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik. Salah satu fasilitas perumahan yang dapat mencerminkan kesejahteraan adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan. Selain itu, juga memenuhi fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar dan

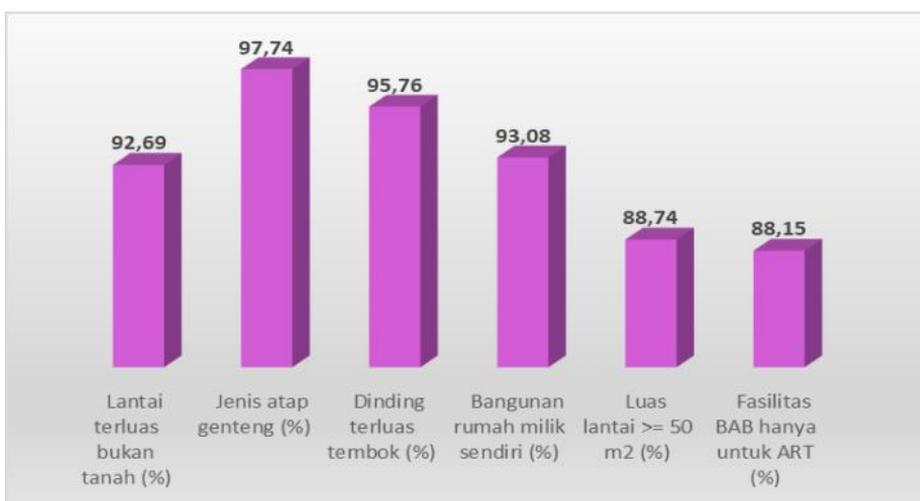
sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

### 6.1. Kualitas Rumah Tinggal

Secara umum rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni harus memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal seperti memiliki lantai, dinding dan atap yang memenuhi syarat, serta mempunyai luas lantai yang mencukupi/sebanding dengan banyaknya orang yang tinggal di dalamnya, termasuk fasilitas penerangan, air minum dan tempat pembuangan akhir/tinja. Selain itu kualitas bangunan tempat tinggal dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi dari penghuninya. Rumah dengan bangunan yang kualitasnya baik tentunya kondisi ekonominya juga lebih baik dibandingkan mereka yang menempati rumah dengan kualitas bangunan yang rendah.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2020, ada sekitar 92,69 persen tempat tinggal dengan lantai terluas bukan tanah. Sebesar 97,74 persen rumah di Kabupaten Ponorogo sudah menggunakan atap genteng, yang mempunyai dinding terluas adalah tembok sebesar

**Gambar 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kabupaten Ponorogo, 2020**



Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020

95,76 persen. Rumahtangga yang menempati bangunan rumah milik sendiri sebanyak 93,08 persen, dan yang luas lantai  $\geq 50 \text{ m}^2$  sebanyak 88,74 persen. Rumahtangga yang mempunyai fasilitas BAB dan digunakan hanya untuk ART sendiri sebanyak 88,15 persen.

## 6.2. Fasilitas Rumah Tinggal

Fasilitas rumah tinggal seperti ketersediaan air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik merupakan faktor yang menentukan kualitas dan kenyamanan rumah tinggal. Salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari adalah air, sehingga ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan dikonsumsi dan sanitasi merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

**Gambar 6.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan di Kabupaten Ponorogo, 2020**



Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020

Pada tahun 2020, rumah tangga di Kabupaten Ponorogo yang menggunakan air minum bersih telah mencapai 91,15 persen. Sementara

rumah tangga yang mengkonsumsi air minum dari air kemasan, air isi ulang, atau air ledeng sebesar 32,94 persen.

Fasilitas perumahan yang cukup penting peranannya dalam usaha sanitasi adalah penyediaan sarana jamban. Jika dilihat dari segi kesehatan lingkungan dan masyarakat, masalah pembuangan kotoran manusia dapat mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik. Pada tahun 2020, rumah tangga yang menggunakan jamban sendiri dengan tangki septik sudah mencapai 86,04 persen. Selain itu jarak tempat penampungan kotoran/tinja yang memadai dan jauh dari sumber air minum akan menghindarkan dari penyebaran penyakit. Jarak tempat penampungan kotoran/tinja ke sumber air minum yang lebih dari 10 meter sebesar 76,07 persen.

Selain itu sumber penerangan merupakan fasilitas perumahan yang penting. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik (PLN dan Non PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibanding sumber penerangan lainnya. Rumah tangga di Kabupaten Ponorogo yang telah menikmati fasilitas penerangan listrik tahun 2020 sebanyak 100,00 persen.

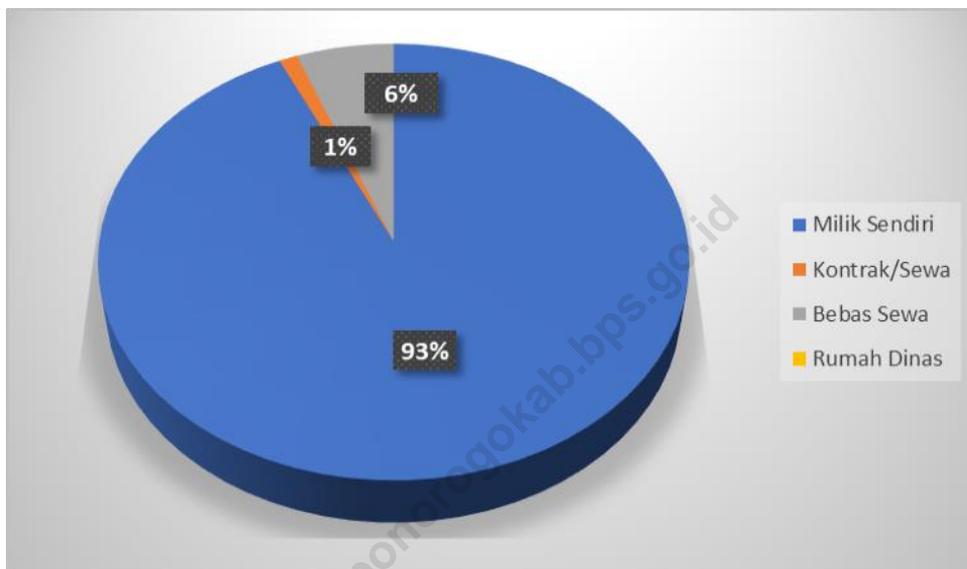
### **6.3. Status Kepemilikan Rumah Tinggal**

Tingkat kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masyarakat dapat dilihat melalui salah satu indikatornya yaitu status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak/sewa, bebas sewa, rumah dinas, atau status rumah kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri akan lebih tenang dibandingkan mereka yang menempati rumah

sewa apalagi yang bebas sewa karena telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjangkau dan permanen dalam jangka panjang.

Sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk maka semakin meningkat pula kebutuhan perumahan. Fakta yang terjadi, lahan untuk

**Gambar 6.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal di Kabupaten Ponorogo, 2020**



Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020

perumahan semakin terbatas dan biaya untuk mendapatkan/membeli rumah yang layak sering tidak terjangkau oleh sebagian besar masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan banyak rumah tangga yang menempati rumah yang kurang layak huni.

Rumah tangga di Kabupaten Ponorogo berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2020 yang menempati rumah milik sendiri sebesar 93,07 persen dan sisanya sebesar 6,93 persen adalah bukan milik sendiri. Rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri terdiri dari kontrak/sewa sebesar 1,09 persen, bebas sewa sebesar 5,84 persen dan rumah dinas sebesar 0 persen.





**KEMISKINAN**

<https://potokokab.bps.go.id>





## 7. KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Mahatma Gandhi menyebut mereka sebagai *the last, the least, the lowest, and the loss*. Pada dasarnya kemiskinan berhubungan dengan kurangnya akses seseorang terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kemiskinan telah menjadi masalah klasik yang dialami oleh setiap negara. Permasalahan ini harus dilihat dari berbagai aspek karena kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang tidak hanya berhubungan dengan kondisi ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya.

Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu agenda penting di setiap negara. Di Indonesia, tiap era kepemimpinan memiliki program khusus untuk pengentasan kemiskinan. Pada masa orde baru pernah digalakkan program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang bertujuan menanggulangi permasalahan ketersediaan infrastruktur di desa-desa yang relatif belum maju. Pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk menyelaraskan berbagai kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan. Sementara itu, masa kepemimpinan Joko Widodo juga menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu fokus utama pemerintah sebagaimana tertuang dalam sembilan agenda prioritas, nawa cita, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, peningkatan layanan kesehatan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## 7.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Ponorogo

Pemerintah Kabupaten Ponorogo sebagaimana tertuang dalam misinya, *Ponorogo Berbenah Menuju Ponorogo Yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius*, telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Ponorogo. Pemerintah terus meningkatkan dan menyempurnakan berbagai program penanggulangan kemiskinan serta meningkatkan kemampuan dan pendapatan rumah tangga miskin melalui kemudahan akses modal.

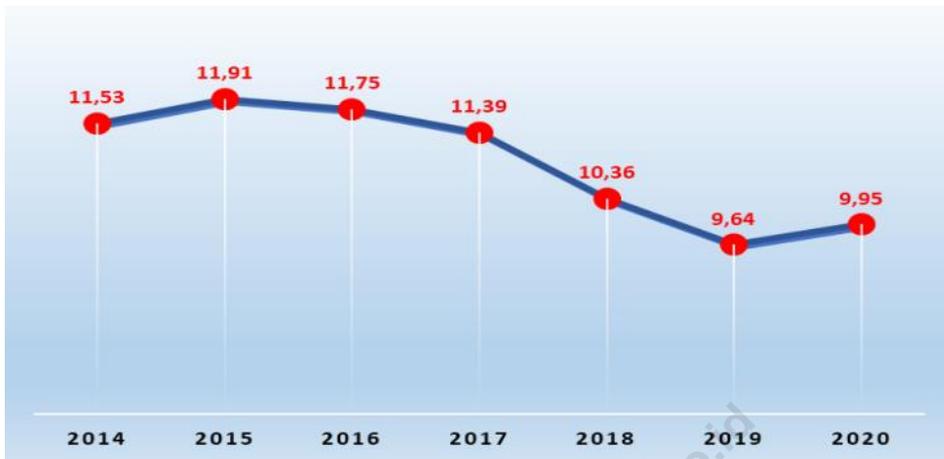
**Tabel 7.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Ponorogo, 2014-2020**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(5)
2014	99,86	11,53
2015	103,22	11,91
2016	102,06	11,75
2017	99,03	11,39
2018	90,22	10,36
2019	83,97	9,64
2020	86,74	9,95

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur 2014-2020

Selama tahun 2014-2020, persentase penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo cukup fluktuatif meskipun dalam tiga tahun terakhir persentase penduduk miskin terus menurun. Pada tahun 2014 penduduk miskin Kabupaten Ponorogo sebesar 11,53 persen, kemudian naik menjadi 11,91 persen tahun 2015. Angka kemiskinan turun pada tahun 2016 sehingga penduduk miskin Kabupaten Ponorogo mencapai 11,75 persen, kemudian tahun 2017, 2018 dan 2019 tetap menurun menjadi masing-masing 11,39 persen, 10,36 persen dan kembali turun menjadi 9,64 persen. Namun pada tahun 2020 mengalami kenaikan 0,31 persen, menjadi 9,95 persen

**Gambar 7.1 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Ponorogo, 2014-2020 (Persen)**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur 2014-2020

## **7.2 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan**

Garis Kemiskinan merupakan batas yang digunakan untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kabupaten Ponorogo mengalami peningkatan antar waktu selama 2014-2020. Pada tahun 2014 garis kemiskinan Kabupaten Ponorogo sebesar Rp. 247.368 per kapita per bulan dan terus meningkat hingga mencapai Rp. 326.205 per kapita per bulan pada tahun 2020.

Kemiskinan harus dipandang secara luas agar dalam implementasi kebijakannya dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Kemiskinan bukan hanya persoalan banyaknya penduduk miskin, tetapi juga seberapa besar jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (tingkat kedalaman) yang disebut sebagai  $P_1$ , dan keragaman pengeluaran antar penduduk miskin ( $P_2$ ).

Indeks kedalaman kemiskinan ( $P_1$ ) mencapai 1,54 pada tahun 2014 kemudian naik 0,09 poin menjadi 1,63 pada tahun 2015. Namun  $P_1$  kembali menurun pada periode 2016 menjadi 1,47, pada tahun 2017 kembali menurun menjadi 1,41 dan pada tahun 2018  $P_1$  kembali menunjukkan penurunan hingga menjadi 1,30. Pada tahun 2019,  $P_1$  kembali meningkat menjadi 1,70, kemudian turun pada tahun 2020 menjadi 1,44. Penurunan  $P_1$  ini menunjukkan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin dekat. Dengan kata lain kesenjangan pengeluaran penduduk miskin Kabupaten Ponorogo terhadap garis kemiskinan semakin rendah.

**Tabel 7.2 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ ), dan Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ ) di Kabupaten Ponorogo, 2014-2020**

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	Indeks Kedalaman Kemiskinan ( $P_1$ )	Indeks Keparahan Kemiskinan ( $P_2$ )
(1)	-2	-3	-4
2014	247.368	1,54	0,30
2015	251.525	1,63	0,33
2016	266.312	1,47	0,28
2017	279.168	1,41	0,27
2018	297.467	1,30	0,26
2019	313.175	1,70	0,40
2020	326.205	1,44	0,31

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur 2014-2020

Indeks keparahan kemiskinan ( $P_2$ ) Kabupaten Ponorogo memiliki pola yang serupa dengan indeks kedalaman kemiskinan ( $P_1$ ) antar waktu. Pada tahun 2014  $P_2$  Kabupaten Ponorogo sebesar 0,30. Pada tahun 2015  $P_2$  meningkat menjadi 0,33. Sedangkan pada tahun 2016  $P_2$  kembali menurun menjadi 0,28 dan terus menurun pada tahun 2017 menjadi 0,27. Pada tahun 2018 indeks keparahan kemiskinan kembali menurun hingga mencapai angka 0,26, dan kembali naik pada tahun 2019 menjadi 0,40. Namun pada tahun 2020 kembali turun menjadi 0,31. Nilai  $P_2$  yang cenderung meningkat menandakan ketimpangan pendapatan di antara penduduk miskin semakin lebar. Sebaliknya nilai  $P_2$  yang cenderung menurun menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin menyempit.

Dari informasi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk miskin semakin berkurang karena tingkat pengeluaran penduduk yang berada diatas garis kemiskinan semakin banyak. Tingkat kedalaman kemiskinan juga semakin mengecil, hal ini disebabkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Tingkat keparahan kemiskinan juga semakin sempit, sehingga ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin mengecil.





**SOSIAL LAINNYA**

<https://portal.pronokab.bps.go.id>





## 8. SOSIAL LAINNYA

### 8.1 Teknologi Informasi dan Komunikasi

Akses terhadap teknologi informasi pada masa kini sudah semakin mudah dan cepat. Dengan teknologi informasi yang semakin canggih, seseorang dapat memperoleh kemudahan dalam melakukan berbagai aktivitasnya baik dalam berkomunikasi, berkerja, berbisnis dan memperoleh berbagai informasi yang mungkin dahulu sulit untuk didapatkan. Sehingga penguasaan/kepemilikan dan akses terhadap teknologi informasi dapat menunjukkan seberapa jauh perkembangan kesejahteraan rakyat.

Di abad milenial ini, kemajuan teknologi informasi berkembang cepat. Era penggunaan telepon sudah bergeser ke *handphone* (HP). Bagi masyarakat sekarang, HP lebih praktis dan ekonomis dibanding telepon. Memiliki HP tidak memerlukan biaya pemasangan dan tidak tergantung adanya sarana kabel telepon. Cukup dengan tower signal, penggunaan HP bisa dilakukan dimana saja.

Di samping itu, pembelian pulsa HP bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing individu. Bahkan hanya dengan perangkat HP, siapapun bisa melakukan akses internet dengan tujuan yang lebih luas.

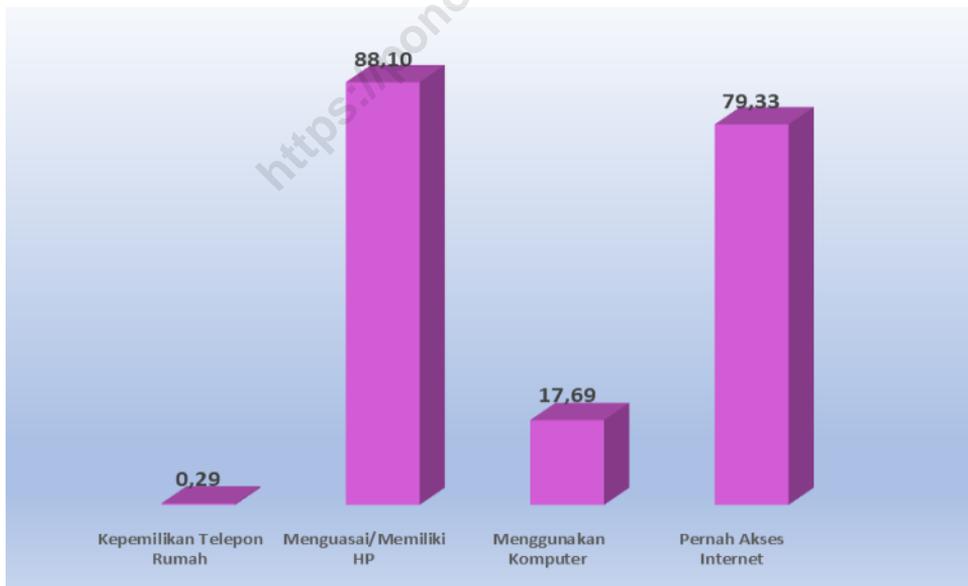
Kepopuleran HP dibandingkan telepon bisa ditunjukkan dari hasil data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2020. Dari data Susenas diperoleh jumlah rumah tangga yang mempunyai telepon di rumah pada tahun 2020 tercatat hanya 0,29 persen. Kondisi ini berbeda jauh dengan jumlah rumah tangga yang anggota rumah tangganya menguasai/memiliki HP yang mencapai 88,10 persen. Rumah Tangga yang menggunakan HP merasa cukup terbantu dibanding yang menggunakan telepon. Berbagai aplikasi yang ditawarkan oleh perusahaan komunikasi seluler, menjadikan HP sebagai alat

komunikasi yang paling diminati di kalangan masyarakat. Dengan memanfaatkan aplikasi HP, rumah tangga bisa melakukan komunikasi lewat Facebook, Whatsapp, Line dan lain sebagainya yang semuanya tidak bisa dinikmati pengguna telepon biasa.

Kelebihan lainnya, untuk daerah-daerah terpencil yang tidak mempunyai jaringan telepon, rumah tangga bisa melakukan komunikasi melalui HP berkat adanya *tower signal* di daerah tersebut.

Sementara rumah tangga di Kabupaten Ponorogo yang menggunakan alat informasi berupa komputer atau laptop dalam tiga bulan terakhir tercatat sebesar 17,69 persen. Persentase ini diduga akan semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring semakin meningkatnya kebutuhan pendidikan dan informasi.

**Gambar 8.1 Persentase Rumah Tangga yang Anggota Rumah Tangganya Menguasai/Memiliki atau Menggunakan Alat Komunikasi dan Informasi dalam 3 Bulan Terakhir di Kabupaten Ponorogo, 2020 (Persen)**



Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2020

Beberapa rumah tangga memanfaatkan komputer dan laptop sebagai sarana penunjang pendidikan dan mengembangkan bisnis (hasil usaha).

Berbagai produk usaha dapat dipasarkan dengan menggunakan komputer dan laptop yang terhubung jaringan internet memunculkan pasar online. Pendek kata, penggunaan alat komunikasi dan informasi semakin diperlukan dan berkembang di tengah masyarakat Kabupaten Ponorogo.

Dengan berbagai kepemilikan rumah tangga akan alat komunikasi dan informasi, semakin mudah pula rumah tangga dalam akses internet guna memperoleh berbagai informasi. Pada tahun 2020, terdapat 79,33 rumah tangga yang anggota rumah tangganya mengakses internet.

## **8.2 Kredit Usaha**

Untuk meningkatkan produktivitas usaha masyarakat, banyak tersedia kredit usaha dari pemerintah dan swasta. Bahkan untuk mendukung usaha mikro kecil dan menengah, pemerintah mengeluarkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan prosedur yang mudah dan bunga yang relatif murah.

Terkait Kredit Usaha Rakyat, tidak sedikit masyarakat yang masih minim pengetahuannya tentang kredit usaha. Sosialisasi KUR terhadap masyarakat umum juga masih dirasakan minim. Hal ini menyebabkan rumah tangga yang memanfaatkan kredit usaha tidak begitu banyak. Akibatnya, di antaranya terjebak pada rentenir dan sistem ijon. Selain itu usaha juga akan sulit berkembang karena kesempatan masyarakat untuk memperoleh modal dengan mudah dan murah terbatas oleh pengetahuannya tentang kredit usaha.

Dari semua rumah tangga di Kabupaten Ponorogo yang anggota rumah tangganya ada yang menerima kredit usaha pada tahun 2020, dapat diambil persentase masing-masing jenis kredit usaha yang diambil. Persentase terbanyak adalah dari KUR sebesar 12,24 persen, diikuti Kredit Lainnya sebesar 9,78 persen. Selanjutnya adalah Program Bank Selain KUR sebesar 7,18 persen, kemudian Program Koperasi sebesar 5,72.

**Gambar 8.2 Persentase Rumah Tangga Yang Anggota Rumah Tangganya Menerima Kredit Usaha Menurut Jenis Kredit Usaha di Kabupaten Ponorogo, 2020 (Persen)**



*Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2019*

Dua jenis kredit usaha yang juga digunakan penerima kredit usaha adalah KUBE/KUB dan Perorangan (Dengan Bunga) masing-masing 0,80 persen dan 1,40 persen. Bagi wilayah yang tidak tersedia lembaga pembiayaan, meminjam uang kepada individu atau seseorang untuk usaha menjadi hal yang sudah biasa. Padahal resiko meminjam kepada individu atau perseorangan cukup beresiko karena kebanyakan berbunga tinggi.

### **8.3 Jaminan Sosial dan Pembiayaan/Asuransi**

Selain adanya program kredit usaha, program kesejahteraan rakyat di Kabupaten Ponorogo juga melalui pemberian jaminan sosial. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, sebagaimana dalam deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan konvensi ILO no. 102 tahun 1952.

Berbagai jenis jaminan sosial atau pembiayaan/asuransi meliputi jaminan pensiun/veteran, jaminan hari tua, asuransi kecelakaan kerja, jaminan/asuransi kematian, dan pesangon PHK. Dari seluruh rumah tangga di Kabupaten Ponorogo yang anggota rumah tangganya ada yang memiliki/menerima jaminan pensiun/veteran dalam setahun terakhir tahun 2020 sebanyak 4,39 persen dan merupakan jenis kepemilikan jaminan sosial yang terbanyak. Terbanyak kedua adalah Asuransi Kecelakaan Kerja sebesar 2,47 persen. Selanjutnya adalah Jaminan/Asuransi Kematian sebesar 2,46 persen. Lainnya adalah jaminan hari tua sebesar 1,53 persen dan pesangon PHK sebesar 0,64 persen.

**Gambar 8.3 Persentase Rumah Tangga yang Anggota Rumah Tangganya Memiliki/Menerima Jaminan Sosial serta Pembiayaan/Asuransi dalam Setahun Terakhir di Kabupaten Ponorogo, 2020(Persen)**



Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2020

Sementara persentase rumah tangga yang menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tahun 2020 di Kabupaten Ponorogo mencapai 15,31 persen.

## 8.4 Kepemilikan Aset

Kepemilikan aset dapat menjadi salah satu acuan umum dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat. Berbagai bentuk aset seperti tanah dan perhiasan dapat menjadi pilihan masyarakat sebagai bentuk simpanan selain tabungan. Masyarakat dengan pendapatan tinggi juga cenderung memiliki fasilitas lengkap dalam tempat tinggalnya untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam kehidupan mereka sehari-hari seperti kepemilikan kendaraan, televisi, komputer, pendingin udara, lemari es dan lain sebagainya.

**Gambar 8.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Aset di Kabupaten Ponorogo, 2020 (Persen)**



Sumber: Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2020

Dilihat dari jenis kepemilikan aset yang dimiliki rumah tangga pada tahun 2020, terbanyak adalah kepemilikan tanah/lahan yaitu sebesar 88,91 persen. Sedangkan aset kedua terbanyak yang dimiliki adalah sepeda motor sebesar 83,25 persen. Aset ketiga terbanyak yang dimiliki adalah lemari es/kulkas sebesar 53,41 persen. Ketiga aset tersebut mempunyai peran yang sangat besar untuk kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga semua kalangan masyarakat baik yang berpendapatan rendah hingga berpendapatan tinggi membutuhkannya. Tanah/lahan berkaitan dengan rumah tempat tinggal mereka. Selain dimanfaatkan untuk area membangun tempat tinggal, tanah juga memiliki nilai yang semakin lama semakin tinggi. Sepeda motor digunakan untuk akses menuju ke berbagai tempat dimana masyarakat beraktivitas dalam kesehariannya dengan mudah. Dengan harga yang cukup terjangkau semua kalangan dapat lebih mudah memilikinya. Lemari es/kulkas berfungsi untuk menyimpan berbagai bahan makanan untuk konsumsi sehari-hari sehingga lebih tahan lama. Dengan begitu rumah tangga dapat lebih menghemat pengeluarannya.



# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PONOROGO**

Jl. Letjend. R. Suprpto No. Ponorogo

Telp/Fax : (0352) 481026 Email : [bps3502@bps.go.id](mailto:bps3502@bps.go.id)

Homepage : <https://ponorogokab.bps.go.id>